

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Virus Covid-19 saat ini sedang mewabah di seluruh dunia, yang memberikan pengaruh signifikan bagi seluruh kehidupan manusia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Covid-19 yang sering dikenal sebagai penyakit Coronavirus 2019 memiliki bahaya (Pardiyanto, 2020). Sejak akhir tahun 2019, Wuhan, China, telah menyaksikan kemunculan kasus COVID-19 ini. Virus corona adalah virus zoonosis, artinya pertama kali menginfeksi manusia setelah menyebar ke hewan. Diyakini bahwa sejak virus Covid-19 berkembang pada kelelawar, kelelawar adalah inang utama virus ketika pertama kali muncul. (Burhan. E, 2020)

Virus Covid-19 menyebar ketika ada kontak langsung atau intim dengan orang yang terinfeksi karena sekresi pernapasan yang dikeluarkan ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, berbicara, atau bernyanyi dapat menyebarkan virus. Gejala yang ditimbulkan bila terinfeksi virus Covid-19 yaitu mengalami demam tinggi, flu, batuk, sesak nafas, dan mengalami hilangnya indra penciuman.

Virus COVID-19 telah melanda lebih dari 227 negara di seluruh dunia, dengan total kumulatif kasus mencapai 256.637.065 kasus per 22 November 2021. (WHO, 2021). Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak virus Covid-19. Pada 2 Maret 2020, dua warga negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Kota Depok dinyatakan positif virus Covid-19, menandai kasus Covid-19 pertama di Indonesia. Virus Covid-19 ditularkan ke dua orang Indonesia oleh orang asing yang pernah berkunjung ke Indonesia. Saat kasus Covid-19 pertama kali muncul, virus tersebut dengan cepat menyebar ke hampir seluruh Indonesia.

Masih aktifnya wabah virus Covid-19 di Indonesia. Menurut informasi dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kementerian Kesehatan RI, pada Senin 22 November 2021, terdapat penambahan 186 kasus positif virus Covid-19 sehingga total negara menjadi 4.253.598 orang. dari tulisan ini. Total orang yang berhasil dievakuasi kini mencapai 4.101.889 orang, naik 342 orang. Sementara itu, ada tambahan 5 kematian akibat virus Covid-19 sehingga total menjadi 143.744 kematian (Annisa, 2021).

Gambar 1 Perkembangan Covid-19 di Indonesia



(Sumber : Twitter @KemenkesRI)

Dampak virus Covid-19 yang tersebar ke berbagai negara ini telah menimbulkan kekhawatiran bagi semua masyarakat, tak terkecuali masyarakat Indonesia. Salah satu dampak yang berpengaruh di masa pandemi Covid-19 adalah di bidang pendidikan dan ekonomi. Menurut data dari Kementerian Tenaga Kerja, 114.340 perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan melakukan Work From Home (WFH) bagi para karyawannya selama masa pandemic Covid-19 (Oskar Arifandi Ginting, 2021). Pemerintah Indonesia segera menetapkan sejumlah kebijakan untuk memerangi virus Covid-19 sebagai tanggapan atas meningkatnya jumlah kasus virus tersebut. Hal itu dilakukan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus tersebut.

Federick menggambarkan kebijakan sebagai “seperangkat tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks tertentu dengan hambatan atau tantangan dan membuat proposal kebijakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan,” seperti dikutip oleh Augustino (2016).

Pemerintah mengambil langkah lanjutan dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. GTPP Covid-19 dibentuk pada tanggal 13 Maret 2020 berdasarkan Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Pemerintah gencar menyerukan kampanye untuk memakai

masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak dengan orang lain sebagai pencegahan penularan covid-19 lebih luas.

Pemerintah pertama kali mengeluarkan aturan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya untuk menghentikan laju penularan virus covid-19 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan (Gitiyarko, 2021). Selama PSBB hal-hal praktis yang mesti diatur meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan moda transportasi, dan sebagainya. Durasi PSBB ditetapkan selama kurang lebih 14 hari yang mengacu pada masa inkubasi terpanjang virus covid-19.

Dengan adanya PSBB mengakibatkan penurunan ekonomi masyarakat dengan demikian pemerintah mengubah kebijakan dari PSBB menjadi PSBB Transisi dan PSBB Ketat dengan pemantauan protokol Kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Memasuki tahun 2021, kasus positif covid-19 di Indonesia belum mengalami penurunan. Pemerintah mulai mengubah kebijakan dari PSBB menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dalam skema PPKM, kegiatan masyarakat dibatasi dengan beberapa ketentuan seperti tempat kerja atau perkantoran menerapkan system *Work From Home* sebesar 75% dan *Work From Office* sebesar 25%, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring, restoran menerima makan dan minum di tempat sebesar 25% dan selebihnya melalui layanan pesan-antar atau dibawa pulang dan beberapa aturan lainnya.

Pemerintah telah melaksanakan beberapa program, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB Transisi dan PSBB Ketat, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), PPKM Mikro, PPKM Darurat, PPKM Level 3 dan 4, dan Vaksinasi Nasional, untuk memperlambat laju penyebaran virus COVID-19 antara tahun 2020 hingga 2022.

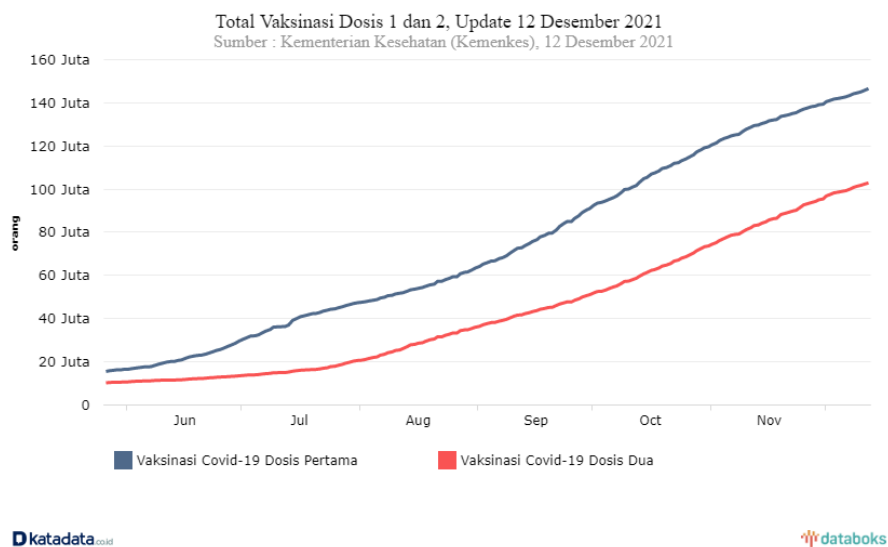
Dalam rangka memerangi pandemi penyakit virus corona 2019 (COVID-19), Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 yang mengatur tentang pelaksanaan vaksinasi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menggambarkan vaksinasi sebagai metode yang mudah, bebas risiko, dan efisien untuk mencegah penyebaran penyakit berbahaya di dalam tubuh.

Pemerintah berencana memvaksinasi sedikitnya 208.265.720 orang Indonesia sebagai bagian dari program imunisasi COVID-19 di Indonesia agar setiap orang memiliki kekebalan tubuh. Diketahui enam jenis vaksin yang berbeda telah

diperkenalkan untuk proses vaksinasi di Indonesia, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Vaksin Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Terhadap Virus Corona (Covid 19). Vaksin *Astra Zeneca*, *China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm)*, *Moderna*, *Pfizer*, *BioNTech* dan *Sinovac Biotech Ltd* termasuk di antara perusahaan yang membeli vaksin buatan P.T. Bio Farma (Persero).

Kegiatan vaksinasi Covid-19 ini merupakan harapan semua orang untuk mengakhiri penularan virus corona. Vaksinasi Covid-19 pertama diberikan pada 13 Januari 2020 di Indonesia. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, menerima suntikan pertama vaksin Covid-19 di Indonesia.

Gambar 2 Data total Vaksinasi Covid 19 Dosis 1 dan 2



Sumber : Katadata.co.id

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) yang dapat dilihat pada gambar 1.2, pada Hari Minggu (12/12/21), total vaksinasi Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 251,97 juta dosis vaksin atau sekitar 146,58 juta dosis vaksin telah diberikan secara rinci, yakni sekitar 70,38% menerima vaksin dosis pertama dan 102,92 juta dosis vaksin atau 49,42% telah menerima vaksin dosis kedua.

Program Vaksinasi Covid-19 di Indonesia mendapatkan respon yang beragam di kalangan masyarakat. Banyak orang masih khawatir tentang keunggulan vaksin COVID-19, mekanisme kerjanya, atau bahkan potensi efek samping negatifnya.

Berdasarkan temuan jajak pendapat online tentang kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Akibatnya, 20% masyarakat Indonesia tidak menginginkan vaksin Covid-19 (Ihsan Suri, 2021).

Salah satu kebijakan pemerintah yang memberitakan mengenai peraturan vaksinasi di media massa ialah wajib melakukan vaksin jika ingin berkunjung ke *mall*. Cara tersebut dilakukan pemerintah agar program vaksinasi tersebut sukses dilakukan untuk menghambat laju penyebaran virus covid-19 di Indonesia. Peraturan tersebut di buat juga untuk membantu perekonomian para pedagang yang terkena dampak pandemic.

Gambar 3 Pemberitaan Mengenai Kebijakan Pemerintah Tentang Aturan Wajib Vaksin di Media



Sumber : <https://www.kompas.com/tag/AMP>

Media memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana informasi mengenai imunisasi COVID-19 dikomunikasikan. Dengan menggunakan sarana komunikasi antara lain surat kabar, radio, televisi, dan internet, media massa menurut (Cangara, 2016), adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber kepada penerima pesan atau kepada masyarakat umum. Media cetak, elektronik, dan online adalah tiga kategori di mana media massa dapat dibagi. Saat ini, mudah bagi orang untuk menemukan dan menemukan informasi yang mereka cari berkat media arus

utama. Industri dan struktur media massa di Indonesia telah berkembang dengan banyaknya varian media massa yang dapat dikonsumsi oleh khalayak, baik itu yang berjenis media massa konvensional (old media) atau media massa digital (new media) yang berbasis internet. Di Indonesia media massa diawasi oleh pemerintah dengan adanya undang-undang tentang pers. Wakil Ketua Dewan Media massa, Leo Batubara menyebutkan hingga awal tahun 2009 di Indonesia ada sekitar 1008 media cetak, 150 lebih media televisi, dan 2000 lebih radio. Total tiras media cetak mencapai 19,08 juta eksemplar (Martono, 2011).

Berdasarkan kajian Rosini dan Siti Nurningsih tentang mengapa masyarakat menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi kesehatan, masyarakat memberikan beberapa penjelasan, salah satunya adalah tersedianya berbagai alat untuk mempermudah mendapatkan informasi kesehatan di media sosial (Rosini, 2018).

Instagram dan Twitter milik Kementerian Kesehatan RI merupakan dua platform media sosial tempat pemberitaan informasi kesehatan tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 melalui media. Keterlibatan Kemenkes untuk menginformasikan kepada masyarakat dengan mengunggah konten cara penanganan positif Covid-19, cara isolasi mandiri jika termasuk orang tanpa gejala, dan juga mengajak masyarakat untuk menjalani pola hidup sehat dan tidak takut Covid. , tetapi untuk lebih berhati-hati (Renata, 2021). Update harian juga dilakukan ke akun media sosial Kementerian Kesehatan tentang evolusi Covid-19 dan perkembangan vaksinasi Covid-19 penduduk Indonesia.

Pemerintah telah mendistribusikan informasi tentang vaksinasi COVID-19 melalui berbagai media dan juga menggunakan tokoh-tokoh terkemuka termasuk selebriti, pakar medis, dan tokoh agama sebagai platform untuk menyebarkan kesadaran tentang vaksinasi. Tujuan dari kebijakan pemerintah tersebut adalah untuk meyakinkan masyarakat secara bertahap bahwa imunisasi Covid-19 aman dan diperlukan dalam upaya menghentikan penyebaran virus corona. Namun, karena berita bohong yang beredar di media, sebagian masyarakat masih meragukan vaksin COVID-19. Istilah "hoax" sering digunakan untuk merujuk pada informasi palsu. Informasi yang bertentangan dengan kenyataan yang ada saat ini dianggap hoax (Rochani Nani Rahayu, 2021). Pemberitaan vaksinasi yang mendapat pro dan kontra menjadi pembahasan di media dan menjadi menarik perhatian banyak orang khususnya para masyarakat yang mengakses internet.

Menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh Era Purike dan Astriana Baiti, ditetapkan bahwa Sebagian besar informasi mengenai vaksin yang tersedia di internet mengandung informasi yang tidak benar karena banyaknya pengguna media sosial di Indonesia dan kurangnya sumber daya ilmiah yang tersedia untuk umum tentang vaksin, maka hal tersebut sangat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap program vaksinasi (Purike & Baiti, 2021). Menurut penelitian Tika Suci Pratiwi, media sosial membentuk keyakinan kaum milenial dan menghalangi mayoritas dari mereka untuk diimunisasi karena ketakutan akan berita positif dan negatif yang beredar di media sosial (Pratiwi et al., 2021). Menurut penjelasan temuan penelitian sebelumnya, keputusan masyarakat untuk memberikan imunisasi COVID-19 sangat dipengaruhi oleh informasi yang dibagikan di media sosial. Dalam hal ini, berarti keputusan pengguna untuk menerima vaksin COVID-19 sangat dipengaruhi oleh media.

Sangat penting untuk melakukan penilaian untuk memilih pilihan terbaik karena proses pengambilan keputusan dimulai dengan penciptaan keinginan yang berusaha untuk dipuaskan. Pemenuhan kebutuhan selalu dikaitkan dengan banyak kemungkinan (Kusumaninghati, 2020). Penelitian mengenai apakah kebijakan pemerintah mengenai vaksinasi covid-19 melalui media massa memiliki pengaruh dalam mengambil keputusan para masyarakat untuk melakukan vaksinasi belum banyak dilakukan. Hubungan antara informasi resmi tentang vaksinasi COVID-19 di media arus utama dengan pilihan memvaksinasi siswa di Jawa Barat membuat peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan mencari jawaban atas pertanyaan penelitian yang dipilih. Mahasiswa didefinisikan sebagai seseorang yang terdaftar di perguruan tinggi, baik itu universitas, institut, atau akademi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Salah satu ciri siswa adalah mereka aktif menggunakan media untuk kebutuhan sehari-hari dan ketertarikan mereka terhadap kemajuan teknologi (Ajani, 2014).

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat yang merupakan bagian dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 2021 akan ada 392 perguruan tinggi negeri dan swasta di Jawa Barat, dengan total pendaftar hingga 826.727 individu (Statistik, 2021)

Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif dan teori *Uses and Effects*. Dengan adanya pemberitaan vaksinasi di media massa membuat masyarakat khususnya mahasiswa pasti memiliki keraguan untuk melakukan vaksinasi covid-19. Namun, peran dari media bisa menimbulkan efek bagi para penggunanya dan dapat diharapkan memiliki reaksi dari masyarakat terhadap informasi yang disampaikan melalui media

massa tersebut. Responden yang dipilih ialah mahasiswa Jawa Barat dikarenakan wilayah di Jawa Barat merupakan urutan kedua tertinggi di Indonesia dengan kasus positif Covid-19 setelah DKI Jakarta.

Pada peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Era Purike dan Astriana Baiti (2021) membahas mengenai Informasi Vaksin di Media Sosial dan Program Vaksin Covid-19: Langkah Apa Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Republik Indonesia? Hasil dari penelitian tersebut memperoleh tiga faktor utama yang dapat mempengaruhi sifat masyarakat terhadap vaksin, salah satunya adalah kondisi politik atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penelitian yang ingin penulis teliti lebih menjelaskan tentang kebijakan yang di berikan pemerintah melalui media massa terhadap keputusan mahasiswa melakukan vaksinasi. Dengan adanya kebijakan di media massa apakah memberikan pengaruh terhadap keputusan mahasiswa dalam melakukan vaksinasi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti **“Pengaruh Kebijakan Pemerintah Melalui Media Massa terhadap Keputusan Melakukan Vaksinasi Covid-19 dikalangan Mahasiswa Provinsi Jawa Barat”** karena permasalahan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis merumuskan berbagai masalah sehubungan dengan masalah tersebut di atas, seperti:

1. Adakah pengaruh kebijakan pemerintah melalui media massa terhadap keputusan melakukan vaksinasi Covid 19 di kalangan mahasiswa Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian yang terletak pada latar belakang penelitian dan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh kebijakan pemerintah melalui media massa terhadap keputusan melakukan vaksinasi Covid 19 bagi mahasiswa di Jawa Barat dan faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi mahasiswa di Jawa Barat dalam melakukan vaksinasi Covid 19.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memperhitungkan beberapa manfaat. Dua jenis manfaat yang diharapkan akademisi dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat membantu dalam kemajuan ilmu pengetahuan umum, memberikan wawasan tentang ilmu komunikasi, dan menjadi sumber untuk penelitian lain di bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

Kajian ini mencakup aplikasi yang diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana kebijakan pemerintah dipengaruhi oleh media terhadap keputusan yang dibuat mahasiswa di Jawa Barat terkait penerimaan vaksin Covid-19.

1.5 Waktu dan Periode Penelitian

Tabel 1 Waktu dan Periode Penelitian

KEGIATAN	2021		2022								
	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep
Persiapan penelitian											
Penentuan topik dan judul											
Penyusunan BAB I											
Penyusunan BAB II											

Penyusunan BAB III											
Pengajuan Desk Evaluation											
Revisi Hasil Desk Evaluation											
Penyusunan BAB IV - V											